

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Keamanan, kesetabilan ekonomi dan iklim sosial yang kondusif merupakan faktor yang sangat penting dalam melaksanakan berbagai macam aktifitas. Tanpa adanya iklim sosial, ekonomi dan keamanan yang kondusif maka tidak akan mungkin seseorang dapat melaksanakan aktifitas sehari-harinya dengan baik.

Gempa bumi dan gelombang tsunami merupakan musibah kolektif yang menimpa beberapa Negara dan sudah mempengaruhi kehidupan masyarakatnya termasuk Indonesia. Gelombang tsunami yang meluluh-lantakkan Aceh adalah musibah terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, yang pastinya akan membawa penderitaan yang berkepanjangan bagi warganya yang tertimpa bencana tersebut.

Gelombang tsunami merupakan bencana kemanusiaan yang besar, bencana ini telah memakan banyak korban dari berbagai kalangan dan meninggalkan penderitaan dan trauma yang berkepanjangan bagi kehidupan penduduk Aceh yang di tinggalkan. Banyak dampak yang ditinggalkan dari bencana tsunami, dari dampak ekonomi, keamanan, kesehatan fisik dan mental, kehidupan anak-anak yang terlantar, pendidikan yang terancam dan banyak lagi permasalahan yang di timbulkan oleh bencana tsunami tersebut. Salah satu konsekwensi utama dari bencana tsunami yang berakibat langsung bagi korban bencana tsunami dalam hal ini yaitu melakukan regenerasi keluarga karena

banyaknya korban yang meninggal dari bayi dan anak-anak dalam bencana itu. Tsunami merupakan bencana yang telah menelan banyak korban dan menjadi isu kemanusiaan nomor satu yang berkembang di Indonesia saat ini. Bencana Tsunami menyebabkan krisis sosial dan juga menyebabkan krisis kemanusiaan yang mengancam keamanan manusia di Indonesia.

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang meluluh lantakkan Aceh bukan hanya sebagai suatu masalah domestik (Indonesia) saja, tetapi sudah menjadi permasalahan dunia internasional. Pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami banyak Negara-negara yang menaruh simpatik kepada Indonesia, khususnya dari Negara yang mempunyai hubungan bilateral dengan Indonesia. Berbagai macam cara dilakukan oleh Negara-negara tersebut untuk menunjukkan rasa simpatiknya kepada korban tsunami di Indonesia (Aceh). Diantara Negara donatur tersebut adalah Negara Jepang Yang mempunyai andil besar terhadap rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Besarnya bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah Jepang dalam rangka membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh itulah yang menarik hati dan perhatian penulis, sehingga pada akhirnya ketertarikan penulis akan hal tersebut tertuang dalam sebuah rumusan yang tercantum dalam sebuah judul **“Peranan Jepang Dalam Membangun Kembali Aceh Pasca Tsunami”**.

B. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menjawab pokok permasalahan tentang peranan Negara Jepang dalam upayannya membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca bencana gempa bumi dan gelombang tsunami.
2. Melengkapi tugas akhir, yaitu penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Menambah wacana keilmuan penulis.
4. Belum adanya penulis lain yang menulis skripsi tentang tema diatas, baik di UMY, UGM maupun UNY.

C. Latar Belakang Masalah

Sebuah gempa berkekuatan 9,0 pada skala Richter di Samudera Hindia yang diikuti oleh gelombang tsunami dahsyat telah menghantam berbagai negara, seperti Indonesia, Thailand, Sri Langka, India, Malaysia, dan beberapa negara di Afrika, di pagi hari pada 26 Desember 2004. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling merasakan dampak dari bencana tersebut dengan jumlah kematian melampaui 137.000 jiwa dan lebih dari 150.000 orang harus kehilangan tempat tinggalnya di Aceh.

Pasca bencana gempa bumi tektonik dan gelombang tsunami membawa pada kondisi yang sangat memprihatinkan dengan melihat kerusakan fisik yang sangat parah di propinsi NAD dan Sumatera Utara. Sejalan dengan kondisi

terhentinya seluruh aktivitas ekonomi di propinsi NAD dan Sumut yang dilanda bencana, masalah-masalah barupun timbul dan semakin menjadi isu nasional yang semakin menonjol.

Perekonomian Propinsi NAD sebelum terjadi bencana didominasi oleh sektor pertanian, migas, dan industri pengolahan. Struktur sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2003 mencapai lebih dari 28%, sektor migas dan industri pengolahan masing-masing mencapai hampir 20%. Terhentinya aktivitas kegiatan ekonomi tersebut membawa dampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Diperkirakan antara 600 ribu-800 ribu (sekitar 25% dari total kesempatan kerja yang ada) orang kehilangan pekerjaan. Sektor perikanan yang memberikan lebih dari 130 ribu kesempatan kerja dan memberi kehidupan hampir 70% penduduk pantai, saat ini kehilangan pekerjaan.¹ Kemungkinan hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat kembali kepekerjaannya. Sedangkan kegiatan dari industri pengolahan, meskipun kesempatan kerja pada sektor ini relatif sedikit, tetapi dampak dari kegiatan lainnya, seperti industri kecil, perdagangan, dan jasa menyebabkan banyaknya kesempatan kerja yang hilang.

Penderitaan masyarakat Aceh yang demikian lama akibat konflik bersenjata yang panjang, ditambah lagi dengan bencana gempa dan tsunami, telah menempatkan mereka pada posisi yang semakin terpuruk. Tingkat kemiskinan

¹ Lampiran 5, Peraturan presiden Republik Indonesia no 30, Tahun 2005, *Tentang Rencana induk Rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara*. kbri-canberra

mencapai 33% dan pengangguran terbuka mencapai 11,2 %. Jika termasuk setengah pengangguran, jumlah penganggur total mencapai sekitar 48 %.²

Program-program pembangunan kembali masyarakat Aceh ditujukan untuk secara simultan memecahkan persoalan fundamental yang ada selama ini, tidak semata-mata mengembalikan kondisi masyarakat Aceh ke keadaan sebelum tsunami. Dengan kata lain pembangunan kembali masyarakat Aceh harus dilakukan dengan membangun (kembali) prakondisi yang diperlukan agar Aceh bangkit. Demikian halnya masyarakat pulau nias Propinsi Sumatera Utara yang mengalami bencana dapat segera memulihkan kondisi ekonominya.

Bencana gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh telah menelan banyak korban dan merusak berbagai fasilitas umum. Hal ini akan membawa kepada perubahan yang begitu besar, dimana dalam perubahan tersebut pasti akan terdapat berbagai permasalahan yang kompleks dan akan muncul, yang tentu saja akan mampu mempengaruhi kehidupan para korban bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut.

Akibat keadaan yang demikian ini, maka perlu diupayakan suatu cara atau jalan untuk dapat menanggulangi permasalahan tersebut. Masalah-masalah besar yang tidak dapat dihindari dari akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut antara lain adalah, tingginya jumlah pengangguran akibat hilangnya lapangan pekerjaan yang disapu oleh gelombang tsunami, pemukiman penduduk yang tidak layak, pendidikan anak-anak yang terancam, serta banyak

² *Ibid,*

lagi permasalahan yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi dan gelombang tsunami tersebut.

Di era globalisasi seperti saat sekarang ini, kesadaran bahwa dunia semakin interdependen meningkat, sehingga masalah yang terjadi di suatu Negara akan menjadi permasalahan di Negara lain. Kesadaran kolektif tumbuh karena adanya masalah bersama yang memerlukan penyelesaian bersama.

Tsunami yang memporak-porandakan beberapa bagian Negara di belahan Samudra Hindia telah menarik perhatian yang serius dari berbagai penjuru dunia. Perhatian masyarakat internasional juga tidak luput dari pandangannya terhadap bencana yang menimpa Indonesia, dimana Indonesia menempati wilayah terparah akibat tragedi tsunami. Bantuan datang dari berbagai masyarakat internasional, ada yang atas nama Negara, Negara yang mempunyai hubungan bilateral dengan Indonesia, LSM, perusahaan asing, organisasi internasional, sipil, militer, tim medis dan masih banyak lagi bantuan yang mengalir dari masyarakat internasional untuk korban tsunami di Aceh.

Pasca tsunami banyak Negara yang bersimpatik kepada korban bencana di Aceh, hal itu dapat dilihat dari banyaknya Negara donatur untuk Indonesia dalam upaya mereka membantu pemerintah Indonesia membangun Aceh kembali. Bantuan dari beberapa Negara donatur seperti Jepang, Amerika, Australia, Arab Saudi, Mesir, Libya, Pakistan, Singapura, Myanmar, Denmark, Canada, Prancis, Qatar, RRC, Taiwan, Inggris, Korea Utara, Korea Selatan, Uni Eropa, Timor Leste, Tunisia, Turki, Uni Emirat Arab, Venezuela, Yordania, Yunani, Austria, Al-Jazair, Belanda, Belgia, Brunei Darussalam, Ceko, Chile,

Italia, Jerman, Kamboja, Kuwait, Latvia Lituania, Estonia, Filipina, Finlandia, Hongaria, India, Irlandia, Iran, Selandia Baru, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Syiria, Thailand, Luksemburg, Malta, Maroko, Norwegia, Portugal, Polandia, Rusia dan lain-lain.

Namun Hal yang menarik untuk dibicarakan dari perilaku aktor-aktor Negara diatas adalah perilaku bantuan Jepang kepada Indonesia yang begitu besar dalam upayanya membantu menanggulangi permasalahan Aceh pasca tsunami dibandingkan dengan negara-negara lainnya, (lihat lampiran 2). Sebagai salah satu Negara kaya, Jepang berperan vital terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca gempa bumi dan gelombang tsunami, ini dapat dilihat dari bantuan, baik materi maupun non materi yang diberikan oleh pemerintah Jepang. Dari mulai Hibah Darurat senilai US\$ 412.297, Hibah Bilateral senilai US\$ 176.500.000 dalam upaya untuk kegiatan rehabilitasi, Bantuan melalui Jica yang mencapai nilai US\$ 370.000, Bantuan melalui Organisasi Internasional yang mencapai US\$ 250.000, Pengiriman Tim Medis sebanyak 77 personil yang terdiri dari berbagai ahli penyakit, Pengiriman 970 pasukan beladiri jepang yang terdiri dari personil angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan join staf office, yang dibantu dengan sarana 5 unit kapal AL Jepang, 3 helikopter AD Jepang, dan 2 unit Hercules AU Jepang, Bantuan dari Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta Jepang, Pengiriman Barang dan peralatan, Tim Penanggulangan Bencana dan pengiriman 1540 unit bantuan darurat oleh JICA dan lain-lain.

Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa Jepang merupakan donatur terbesar bagi Indonesia dibandingkan Negara-negara donatur lainnya dalam upayannya membantu menanggulangi pemasalahan yang diakibatkan oleh gempa bumi dan gelombang tsunami di Aceh, (lihat lampiran 2). Keinginan pemerintah Jepang untuk membantu pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi dan merehabilitasi Aceh bukan hanya niatan saja, tetapi benar-benar direalisasikan dalam bentuk bantuan baik yang bersifat fisik maupun Non fisik. Keinginan pemerintah Jepang dalam membantu pemerintah Indonesia memang hal yang tidak bisa di tawar lagi, dan keinginan Jepang itu terucap dari perkataan Dubes Jepang untuk Indonesia, Yutaka Imura yang mengatakan bahwa pemerintah Jepang bersiap akan menambah bantuan hibahnya ke Indonesia. Konsistensi Pemerintah Jepang dalam membantu pemerintah Indonesia menanggulangi permasalahan yang ditimbulkan oleh gelombang tsunami tidak lepas dari hubungan diplomatik kedua Negara yang cukup positif dalam dekade 30 tahun. Sebagai mana yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan mitra dagang yang menguntungkan bagi Jepang.

Dan hal lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa niatan Jepang dalam membantu Indonesia dalam membangun kembali Aceh, hal ini dikarenakan Jepang merupakan Negara kaya di Asia yang dermawan yang berkonsistensi menjaga perdamaian dunia dan berperan aktif terhadap bantuan internasional. Disamping Indonesia merupakan mitra dagang yang berpotensi bagi Jepang. Namun bantuan Jepang kepada Indonesia juga didasari pada nuansa politik, dimana Jepang ingin lebih meniadatkan dan memperkuat hubungan bilateral

dengan Indonesia, untuk menjaga iklim investasinya di Indonesia dan mengingat ketergantungan Jepang akan SDA Di Indonesia. Dari bahan-bahan mentah, minyak dan gas bumi serta sektor non migas Indonesia dimasa-masa yang akan datang. Selain maksud dan tujuan diatas Jepang juga ingin menunjukkan pengaruhnya dikawasan regional maupun global dan berusaha membangun kembali kepercayaan dan image positif dimata masyarakat Indonesia yang pernah menjadi sasaran agresi militernya.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu pokok permasalahan sebagai berikut: **“Mengapa dan bagaimana Jepang berperan aktif dalam membangun kembali Aceh pasca tsunami ?**

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas rumusan masalah diatas, penulis akan menggunakan beberapa kerangka berfikir sebagai berikut :

1. Konsep Peran

Untuk mambantu dalam menjelaskan peran Negara Jepang dalam upayanya ikut membantu menanggulangi permasalahan di Aceh akibat bencana gempa bumi dan gelombang tsunami. Penulis akan menggunakan *konsep peran* untuk menyederhanakan kenyataan-kenyataan yang kompleks. Konsep seperti yang diungkapkan Mohtar Mas'ood adalah abstraksi yang mewakili suatu objek

sifat suatu benda, atau suatu fenomena terjadi.³ Konsep ini menunjukkan sifat-sifat objek yang di pelajari seperti orang, kelompok, Negara, atau organisasi internasional yang relevan bagi studi tertentu.

Thori Peranan (Role Theory) memandang bahwa, prilaku itu harus dipahami dalam konteks sosialnya. Kita tidak akan bisa menjelaskan fenomena politik kalau kita hanya melihat Individu terlepas dari konteks sosialnya. Prilaku para aktor selalu dibatasi oleh lingkungannya. Peranan (role) adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah prilaku yang diletakkan pada suatu posisi. Setiap orang atau aktor yang menduduki posisi itu, diharapkan akan berperilaku sesuai dengan posisi itu.

Teori Peranan menegaskan bahwa "*prilaku politik... adalah prilaku dalam menjalankan peranan politik*".⁴ Sedangkan menurut Jack C. Plano, yang dimaksud dengan peran dalam Kamus Analisa Politik diartikan sebagai prilaku yang diharapkan akan dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu.⁵ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar prilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.

Seperti tersirat dalam uraian diatas, teori peranan berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai dari posisi presiden, menteri luar negeri, anggota DPR, warga biasa bahkan aktor Negara sekalipun yang masing-masing posisi itu memiliki pola prilaku tersendiri. Seorang yang

³ Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, L.P3S, Jakarta, 1994, hal93-94.

⁴ Heinz Eulau Dikutip dalam Alan Issak, *Scope And Methods Of Political Science* (Homewood, III.;Dorsey, 1981), h.254.

⁵ Jack C. Plano, Robert F. Riggs dan Helena S. Dahin, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta

menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan (expectation) itulah yang membentuk suatu peranan.

Negara Jepang pada pengertian diatas menduduki posisi sebagai Negara kaya, makmur dan super dikawasan Asia yang mempunyai hubungan bilateral yang baik dengan Indonesia, sehingga hal itu memicu sebuah harapan bagi Negara-negara korban tsunami di Asia termasuk Indonesia agar Jepang membantu menanggulangi permasalahan tsunami tersebut. Keputusan untuk membantu korban tsunami itu di buat ketika Jepang sedang menjalankan suatu peranan atau serangkaian peranan yaitu sebagai Negara kaya dan dermawan yang menghendaki pulihnya kondisi Aceh agar terciptanya iklim yang kondusif di Indonesia. Kedermawanan Negara Jepang dapat kita lihat dari konsistensi Jepang dalam menjaga keamanan dan bantuan internasional. dan fakta inilah yang menurut teori peranan paling penting untuk diperhatikan.

Darimana datangnya harapan tersebut? Menurut Alan Isaak, harapan bisa muncul dari dua sumber⁶. *Pertama*, itu bisa muncul dari harapan yang dipunyai oleh orang lain terhadap seorang aktor politik. Artinya, setiap masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang aktor politik. Namun harapan itu tidak hanya datang dari orang lain, ia juga bisa datang dari dalam diri aktor politik itu sendiri. Aktor politik itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan oleh orang-orang lain dari dirinya. Jadi, jenis sumber pertama yang disebut dalam teori peran adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran

dengan persepsi si pemegang peran terhadap harapan itu. *Kedua*, Harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya; yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan. Keputusan yang diambil oleh sang aktor yang memegang suatu peranan itu tidak hanya berdasarkan pada gagasannya semata, tetapi juga di pengaruhi oleh harapan orang lain terhadap peranan yang di pegangnya.

Menurut Jhon Wahlke, teori peranan mempunyai dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik⁷. *Pertama*, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan prilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik seorang aktor baik individu, kelompok ataupun Negara selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berfikir teori peranan memandang individu atau Negara sebagai aktor yang bergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. *Kedua*, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku Negara sebagai aktor politik, kelompok maupun individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini

⁷ *Ibid*, Mukhtar Mas'ood, hal. 45

adalah komponen-komponen yang membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa di defenisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.⁸

Satu hal yang ingin kita garis bawahi dari uraian teori peran ini, yaitu bahwa perilaku aktor politik di pengaruhi oleh peran yang dimainkannya. Teoritisi peranan menunjukkan bahwa setiap peranan berkaitan dengan peranan lain. Uraian diatas menimbulkan beberapa implikasi, *Pertama*, teori peranan berkaitan dengan situasi sosial yang kompleks. *Kedua*, Peranan yang terlihat nyata sesungguhnya terdiri dari berbagai sub-peranan.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Negara Jepang sangat berperan bagi pembangunan Aceh pasca tsunami. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemerintah Jepang berperan sangat penting sebagai alat atau proses tercapainya iklim yang kondusif di Aceh pasca tsunami. Sebagai alat disini di maksudkan bahwa peranan Negara asing dalam hal ini Jepang mempunyai kekuatan yang sangat mendukung bagi pemerintah Indonesia dalam merehabilitasi dan merekonstruksi Aceh yang telah porak poranda. Negara Jepang dalam hal ini merupakan Negara yang bersifat multi fungsi sebab menjalankan fungsi yang bersifat umum, yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam menanggulangi korban bencana tsunami secara menyeluruh. Baik bantuan yang bersifat mendesak, bantuan jangka menengah dan bantuan yang bersifat jangka panjang. Peranan Negara Jepang dalam membantu pemerintah RI merupakan sebuah

⁸ *Ibid*, hal. 45

konsep yang dibentuk oleh pemerintah Jepang untuk membantu menanggulangi berbagai macam bentuk persoalan yang ditimbulkan oleh bencana tsunami. Jepang merupakan salah satu Negara kaya yang dermawan dalam membantu para korban bencana gelombang tsunami di seluruh dunia. Masalah tsunami adalah masalah yang kompleks karena menyentuh hampir setiap kehidupan manusia, baik bagi korbannya atau orang yang ditinggalkannya. Tsunami mengakibatkan krisis ekonomi, keamanan dan sosial yang kemudian dapat mengancam stabilitas politik suatu Negara. Pemerintah Jepang berupaya agar aktifitas-aktifitas yang dijalankannya sesuai dengan tujuan utamanya yang ingin di capai yaitu membantu pemerintah Indonesia dalam merekonstruksi dan merehabilitasi Aceh pasca tsunami.

Negara adalah *agency* (alat) yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁹ Manusia hidup dalam kerjasama, sekaligus hidup dalam suasana yang penuh antagonostis dan pertentangan. Negara adalah unit dasar dari masyarakat internasional, sedangkan unit dasar dari Negara adalah individu-individu sebagai warga dari suatu Negara.

Negara sebagai aktor internasional berfungsi sebagai media untuk berkomunikasi secara internasional dalam hal yang berbeda-beda, dengan demikian adanya peranan Negara dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran Negara

⁹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal.38

Jepang sebagai Aktor internasional dalam membantu menanggulangi permasalahan Aceh merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Aktor yang paling penting dalam hubungan antara bangsa ialah Negara. Negara ialah entitas wilayah yang dikuasai oleh pemerintah dan diduduki oleh sejumlah penduduk. Sebuah Negara bebas dari segala macam ancaman, gugatan dan tekanan pihak luar malah ia berkuasa secara mutlak (konsep kedaulatan) untuk menentukan kepentingan dan kebaikannya sendiri. Antara lain, sebuah Negara berkuasa membuat dan melaksanakan undang-undang, menarik pajak, cukai, membentuk kekuatan tentara, menggunakan sumber daya alamnya, malah boleh dikatakan sebenarnya sebuah Negara dapat melakukan apa saja dalam lingkungan kedaulatannya demi kepentingan nasional. Kedaulatan yang dimiliki oleh sesebuah Negara diakui oleh Negara-negara lain melalui hubungan diplomatik.¹⁰

Permasalahan Aceh bukan hanya menjadi permasalahan pemerintah Indonesia saja, namun sudah merupakan permasalahan dunia internasional secara keseluruhan. Kesadaran akan hal itulah yang membuat pemerintah Jepang bersedia membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh sampai tuntas.

Hubungan Negara dengan lingkungan tempatnya melakukan aktifitas sangat penting. Suatu Negara berada dalam kebudayaan dan struktur sosial masyarakat yang sangat luas, agar dapat bertahan hidup Negara harus mampu memenuhi fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat baik dalam skala nasional

¹⁰ <http://www.pts.com.my/modules.php?name=News&file=article&sid=170>

Jadi politik luar negeri itu bertujuan untuk mewujudkan cita-cita nasional serta memenuhi kebutuhan utama suatu Negara. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan langkah nyata guna mencapai, mempertahankan dan melindungi kepentingan nasional suatu Negara.

Sementara itu elemen kedua politik luar negeri adalah sarana (means) yang digunakan untuk mencapai tujuan nasional. Ada beberapa teknik dalam perilaku politik luar negeri, yaitu bersifat verbal misalnya diplomasi dan propaganda serta bersifat tindakan misalnya aktifitas ekonomi dan militer.¹²

Sarana lain yang digunakan untuk menjalankan politik dalam negeri maupun politik luar negeri adalah *Power* (kekuasaan). Adapun sumber kekuasaan meliputi kekuatan militer, ekonomi dan politik. Demikian sumber-sumber kekuasaan itu pada gilirannya akan menyebabkan besarnya kekuatan Negara yang bersangkutan.

Pembahasan mengenai politik luar negeri selalu dimulai dari kepentingan nasional Negara yang melaksanakannya. Dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga didasari pada konsep kepentingan nasional. Hans J Morgenthau mengatakan bahwa esensi dari politik luar negeri adalah kepentingan nasionalnya.¹³ Maksudnya adalah bahwa politik luar negeri suatu Negara didasarkan pada kepentingan politik domestik atau bahwa politik luar negeri merupakan kepanjangan tangan dari politik dalam negeri yang diformulasikan dalam kepentingan nasional Negara tersebut.

¹² J Frankel, *Hubungan Internasional*, (terjemahan) Laila Hasyim, (Jakarta Bumi Askara, 1991), hal 121

¹³ Djuandi M. Anwar, *Diktat Politik Luar Negeri Indonesia*, Fakultas Jurnalis, UIUAM, 1999, hal

Dari uraian diatas maka politik luar negeri biasa digunakan atau terjadi apabila interaksi yang dilakukan dalam bentuk hubungan terhadap masyarakat internasional bertujuan untuk memenuhi kepentingan nasional, demikian juga seperti apa yang dikemukakan oleh KJ. Kholsty;

“Pokok permasalahan dalam penentuan kebijakan luar negeri pada umumnya dititikberatkan pada usaha untuk memecah berbagai masalah persoalan yang berhubungan dengan masalah dalam negeri maupun masalah luar negeri”¹⁴

Uraian diatas dapat memberikan penjelasan bahwa upaya Pemerintah Jepang dalam membantu Indonesia membangun kembali Aceh pasca tsunami, disamping memang dalam bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi bantuan Jepang yang diberikan kepada Indonesia juga mengandung unsur politis dalam rangka menjaga kepentingan dan investasi Jepang di Indonesia. Tsunami di Aceh dan Sumatera Utara menjadi moment penting bagi Jepang untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dengan Indonesia, hal ini mengingat dimasa-masa mendatang kedua Negara akan mengalami saling ketergantungan disegala bidang. Dan dimasa yang akan datang dalam upaya memenuhi ekspansi produksinya Jepang sangat membutuhkan barang-barang mentah dan sektor migas maupun non migas dari Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan nasionalnya. Kekayaan sumber daya hayati dan non hayati yang dimiliki oleh Indonesia memang hal yang sangat menggiurkan bagi pemerintah Jepang, hal ini dapat dilihat dari keinginan Jepang untuk menguasai sektor produksi dunia dimana hal itu harus didukung dengan adanya Sumber daya alam yang cukup, sumber daya

¹⁴ KJ. Holsty, *International Relations: A Framework for Analysis*, diterjemahkan Imam Sudrajat, Pustaka Ilmu, Jakarta, 1992, hal.175

manusia untuk menunjang sektor produksinya, dan pasar untuk memperlancar perdagangannya. Dan Indonesia merupakan salah satu sasaran yang tepat bagi pangsa produksi Jepang tersebut. Bantuan pemerintah Jepang kepada Indonesia juga menjadi sarana oleh pemerintah Jepang untuk menarik perhatian dan simpatik dunia internasional umumnya, dan masyarakat Indonesia khususnya bahwa Jepang merupakan Negara dermawan, disamping Jepang ingin menunjukkan eksistensinya sebagai Negara super dikawasan Pasifik. Berperan penuh di Aceh sangat penting dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menghapus citra negatif Jepang dimata rakyat Indonesia, mengingat kedua Negara pernah mempunyai masa lalu yang kelam dalam sejarahnya.

F. Hipotesis

Adapun upaya yang dilakukan oleh Jepang dalam upayanya membantu rekonstruksi Aceh antara lain adalah :

1. Segi Ekonomi: Memberikan bantuan berupa hibah darurat dan bilateral berupa uang dan berupa barang seperti obat-obatan dan makanan.
2. Segi Sosial : Membantu korban bencana dan membangun infrastruktur yang rusak seperti pemukiman, mendirikan tenda sementara yang dilakukan tim penanggulangan bencana Jepang
3. Adanya kepentingan akan SDA dan investasi di Indonesia yang melatar belakangi bantuan Jepang pasca Tsunami

I. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I : Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut : Alasan pemilihan judul, Tujuan penulisan, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Kerangka pemikiran, Hipotesis, Jangkauan penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

BAB II : Dalam Bab II ini akan diuraikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut : Tsunami dan dampaknya terhadap Aceh yang meliputi; tsunami, Dampak bencana terhadap Kondisi Sosial-Politik, Dampak bencana terhadap Perekonomian Aceh, Dampak Bencana Terhadap Pendidikan dan Kesehatan NAD, Korban Tsunami di Aceh, Trauma Psikologis Pasca Tsunami, Tsunami dan dampak internasional, Dampak Tsunami di Beberapa Negara Korban Lainnya, Pengaruh Tsunami Terhadap Jepang, dan reaksi masyarakat internasional terhadap tsunami.

BAB III : Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai hal-hal sebagai berikut : Posisi Jepang, politik luar negeri Jepang, ekonomi Jepang, Hubungan sosial budaya Indonesia-Jepang, kerjasama politik Indonesia-Jepang, kerjasama pendidikan sebagai pilar penyangga Indonesia-Jepang, kerjasama ekonomi Jepang-Indonesia. Gambaran

Umum Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia, Tujuan Kerjasama Ekonomi Jepang Kepada Indonesia, Perkembangan Kerjasama Ekonomi Jepang-Indonesia, peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia-jepang.

BAB IV : Pada bab IV ini akan di jelaskan tentang : Peranan jepang dalam membangun kembali aceh pasca tsunami, bantuan pemerintah jepang, Bantuan Pemerintah Jepang Kepada Indonesia Pasca Gempa Bumi dan Tsunami, yang melingkupi, Bantuan darurat, Bantuan hibah Bilateral, Bantuan melalui organisasi internasional, Pengiriman tim medis darurat Jepang, Pengiriman pasukan bela diri Jepang, Bantuan pangan dan barang di Natura dari pemerintah daerah dan perusahaan swasta Jepang, Bantuan Jepang Terhadap Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Pasca Tsunami, Bantuan rehabilitasi yang mendesak, Rehabilitasi dan rekonstruksi jangka menengah, Pembangunan jangka panjang, Pembangunan *Early Warning System* dari Pemerintah Jepang dan Negara-negara Asean, tujuan politis bantuan Jepang terhadap korban tsunami, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Memulihkan Pendapatan, Memulihkan Infrastruktur Publik, Memulihkan Sistem Perbankan, Mendukung Sarana Produksi Non Publik, Peningkatan Akses Sumber Daya Produktif Pembangunan aceh menialang setelah tsunami

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan mencoba untuk menyimpulkan hasil

penelitian dari permasalahan diatas berdasarkan data data yang ada